ABSTRAK

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan pemberian pernyataan secara profesional dari pihak auditor eksternal yang menyatakan kelengkapan penyajian data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan incaran setiap organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian maka dapat dianggap bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan sudah sepenuhnya baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak yang berhasil memperoleh opini ini. Berdasarkan hal inilah maka berbagai upaya mulai dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah guna memperoleh Opini WTP tersebut termasuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang beberapa tahun sebelumnya hanya mampu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian sehingga berbagai perbaikan dan pembenahan terus dilakukan guna mencapai sasaran yang ditentukan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENCAPAI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa strategi apa saja yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun anggaran sebelumnya, apasaja faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam mencapai opini WTP serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dengan menggunakan ***Penelitian Kualitatif,* *metode deskriptif dengan pendekatan induktif.***

Dari hasil penelitian dan pengamatan secara langsung dilapangan menunjukan bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang baik belum sepenuhnya dapat diterapkan hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari berbagai pihak serta belum ada kejelasan regulasi yang mendukung sehingga pengelolaan keuangan hanya dipahami oleh pejabat pengelola keuangan di beberapa instansi saja dan belum menyeluruh.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan strategi dalam mencapai opini WTP ialah melakukan pembenahan mulai dari rekrutmen hingga penempatan harus sesuai dengan kompetensi, memperbanyak pelatihan terkait pengelolaan keuangan, menjalankan rencana aksi sebagai respons terhadap temuan-temuan di tahun anggaran sebelumnya sehingga semakin hari akan semakin baik dan dapat mencapai opini WTP bila semua pihak yang yang saling berkaitan paham akan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan saling mendukung dalam mewujudkan LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan yang diharapkan.